

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah diatur pada UU No 32 tahun 2004 yang diperbaharui oleh UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana dalam kebijakan tersebut pemerintah daerah mengurus wilayahnya mempunyai wewenang dalam mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah daerah di haruskan menyusun laporan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerahnya dan laporan tersebut menjadi salah satu sumber informasi untuk evaluasi kinerja pemerintah daerahnya.

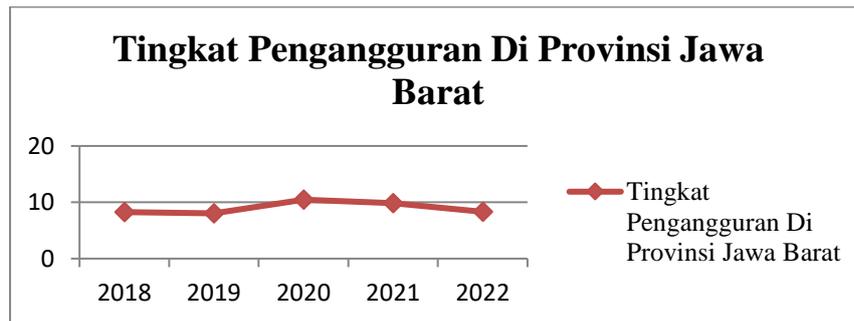
Pemerintah daerah diberi keleluasaan mengoptimalkan daerah masing – masing. Otonomi daerah menjadi salah satu cara pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan keuangan sumber daya dimiliki wilayahnya dalam menaikkan perekonomian serta menjadi salah satu alat penyokong tujuan nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan dalam mengelola finansial wilayahnya masing – masing yang dahulunya memakai sistem anggaran manual saat ini berubah menjadi kerangka rencana keuangan berbasis kinerja. Dalam menilai baik ataupun buruknya pengelolaan keuangan daerah kita dapat menggunakan sebuah kinerja keuangan, kinerja tersebut sebagai tolak ukur bagaimana pemerintah daerah dapat menyerap dan melaksanakan anggaran yang telah di tuangkan dalam APBD untuk mencapai tujuan.

Pada era pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia mengalami dampak yang sangat signifikan, begitu juga dengan tingkat pengangguran. Banyaknya pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempat mereka bekerja saat itu, dari tempat mereka bekerja menyebabkan kenaikan yang cukup kuat terhadap angkapengangguran. Di berbagai daerah yang ada di Indonesia hal ini dapat diatasi dengan pertumbuhnya beberapa sektor produksi sehingga

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka (BPS, 2022).

Gambar 1.1

Laju Tingkat Pengangguran



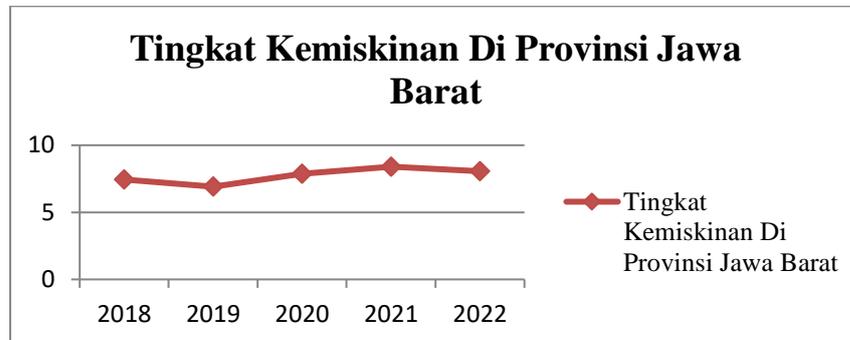
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar grafik 1.1 data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat menunjukkan bahwa kendati indeks pembangunan manusia di Jawa Barat mengalami fluktuatif. Tingkat pengangguran sempat menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, namun justru ada kenaikan persentase tingkat pengangguran. Puncaknya, pada saat adanya pandemi 2020, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mengalami peningkatan. Namun, dengan lambat laun tingkat pengangguran mengalami penurunan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat.

Kemiskinan menjadi masalah yang cukup krusial terutama pada masa keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid-19. Kondisi perekonomian yang turun menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut BPS kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh efek domino, kenaikan harga BBM, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tingginya harga bahan pokok pada saat itu. Distribusi kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh kebutuhan makanan yang total mencapai 75,15%, dan 25,85% yang disebabkan diantaranya oleh BBM, dan kontrakan rumah.

Gambar 1.2

Laju Tingkat Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar grafik 1.2 data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat terhitung tinggi per 2021 dengan dampak adanya covid-19. Namun, dengan lambat laun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup baik. Dari hasil data yang diperoleh ini dapat menunjukkan kinerja pemerintah cukup baik untuk menurunkan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.

Gambar 1.3

Laju Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

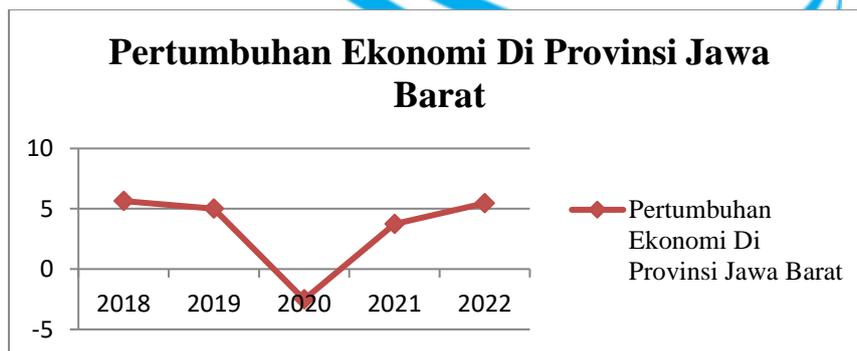


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar grafik 1.3, dapat menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena kemampuan setiap daerah dalam mengembangkan potensi mereka cukup terbatas maka pemerintah daerah saat itu sangatlah bergantung pada pemerintahan pusat, selain itu diakibatkan karena adanya covid-19 yang menunjukkan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan dan membuat daerah tersebut mengalami ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia memiliki pergerakan yang kurang stabil. Untuk menghadapi ini pemerintah telah melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan guna memutus rantai penyebaran covid-19, tetapi kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) padahal kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Gambar 1.4
KARAWANG
Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar grafik 1.4 data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi sempat ada pelambatan di tahun

2020 akibat adanya pandemi. Dari data terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 naik dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menjadi kunci kesuksesan bahwa keuangan pemerintah daerah berlangsung dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menjadi kunci kesuksesan bahwa keuangan pemerintah daerah berlangsung dengan baik, namun saat ini pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami kenaikan pasca Covid-19, selanjutnya kemiskinan pun mengalami peningkatan pula. Dalam sebuah artikel yang disampaikan bandungbergerak.id dengan narasumber Deden Ramdan, pemerhsti kebijakan publik Unpas mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sempat ada pelambatan di tahun 2020 akibat pandemi. Dari data terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Barat naik menjadi 3,74%. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat terhitung tinggi per 2021, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai angka 8,4%. Kendati indeks pembangunan manusia di Jawa Barat menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun justru ada kenaikan persentase tingkat pengangguran. Puncaknya, pada saat pendemi 2021, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menyentuh angka 9,82%.

Permasalahan lain terjadi saat ini di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai ketergantungan pemerintah daerah. Dalam sebuah artikel cnnindonesia.com dengan narasumber Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ada sekitar 51,40% masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi mereka cukup terbatas, selain itu diakibatkan karena covid yang membuat pendapatan mereka menurun. Hal ini juga menunjukan bahwa pemerintahan dalam rangka mengurangi pengangguran meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta tingkat ketergantungan masih sangat rendah.

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin memiliki pekerjaan tetapi belum dapat diperolehnya Rosalia (2019). Menurut penelitian Susi Astuti dan Mispityanti (2019) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun,

menurut penelitian Nurulita et al (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan terhadap tingkat pengangguran.

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi seluruh aspek kehidupannya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan lain – lain Arfiani (2019). Menurut penelitian Helen et al (2021) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, menurut penelitian Setiani & Ismunawan (2022) menyatakan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Nur & Murwaningsari, 2020). Menurut penelitian Aysiah et al (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian Linda Kusumaningtyas (2023) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses untuk memahami bagaimana ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang atau dapat diartikan sebagai adanya suatu peningkatan ekonomi dalam waktu jangka panjang (Adilistyono, 2019). Menurut penelitian Nurdiana et al (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan menurut Heryanti et al (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah,

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Neni Nurhayati dan Amir Hamzah (2020) yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini adalah pada penambahan tiga variabel independen yaitu pengangguran, kemiskinan dan ketergantungan pemerintah daerah. Manfaat dari penelitian ini guna melihat faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang ada.

Mengingat pada akhir tahun 2019 di seluruh dunia termasuk dengan Negara Indonesia terlebih pada Provinsi Jawa Barat terdampak pandemi covid-19 akibatnya seluruh perekonomian menjadi tidak lancar dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk alat evaluasi dan dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan agar kedepannya perekonomian di masa yang akan datang mampu berkembang secara stabil. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, serta tingkat ketergantungan mengalami penurunan serta karena kondisi dari pasca covid-19 menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian mengenai “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat gambaran dasar permasalahan tersebut, maka dapat dibuatkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Banyaknya pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat mereka bekerja di tahun 2020.
2. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat.
3. Adanya kenaikan harga BBM, dan tingginya harga bahan pokok di tahun 2021.
4. Berkurangnya jumlah konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) di tahun 2020.
5. Ditemukannya *research gap* pada penelitian terdahulu mengenai tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat terdapat beberapa permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup yang hanya berisi tentang:

1. Bidang kajian akuntansi pada penelitian ini adalah Akuntansi Pemerintahan.
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif deskriptif.
3. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka membataskan ruang lingkup penelitian kepada tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Periode pengamatan yang dilakukan peneliti adalah lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2022.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini, dijelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian yang dapat menunjukkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat.
2. Menguji dan menganalisis bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat.
3. Menguji dan menganalisis bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat.
4. Menguji dan menganalisis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat.
5. Menguji dan menganalisis bahwa tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan bukti secara empiris pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang
- c. Pemerintahan serta untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Manfaat yang akan didapat oleh penulis adalah dapat memberikan informasi kepada peneliti khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah.

b. Manfaat bagi Universitas

Manfaat yang didapat oleh penelitian ini adalah sebagai dokumen referensi akademik bagi perguruan tinggi yang bersangkutan.

c. Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengambil keputusan.

